



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 28 Juli 2017

Halaman: 1

SOAL ISU SISWA TOLAK IMUNISASI CAMPAK
Dinkes: Risiko Tanggung Sendiri

UMBULHARJO (MERAPI)- Program imunisasi campak-rubella atau measles rubella (MR) kepada siswa SD dan SMP menuai masalah di Kota Yoga dan Bantul. Sejumlah siswa di sekolah berbasis agama jenjang SD dan SMP dikalahkan menolak imunisasi MR dengan alasan vaksin menggunakan bahan tak halal. Dinas Kesehatan pun tidak bisa memaksa masyarakat yang menolak imunisasi campak-rubella atau measles rubella (MR).

Kepala Dinkes Kota Yogyakarta Fita Yulia Kiswornu kepada wartawan, Kamis (27/7) mengatakan, pihaknya mengingatkan kepada orang tua siswa yang menolak imunisasi jika nantinya terjadi sesuatu pada kondisi kesehatan anak, maka harus ditanggung sendiri. Termasuk risiko menularkan kepada anak lain.

"Kalau ada yang nolak harus jelas. Apa alasannya nolak. Kami tidak bisa memaksa. Tapi kami akan lakukan pendekatan bersama Dinas Pendidikan," kata Fita. Pernyataan itu menanggapi beredarnya kabar adanya sekolah berbasis agama jenjang SD dan SMP di Kota Yogyakarta yang menolak imunisasi MR. Penolakan itu karena diduga vaksin menggunakan bahan tak halal.

* Bersambung ke halaman 9

Dinkes:

Dia menyampaikan ada informasi dari Kementerian Kesehatan RI yang memastikan vaksin MR dijamin halal. Hal itu akan disosialisasikan ke masyarakat.

Rencananya, imunisasi MR akan diberikan di sekolah-sekolah mulai Agustus 2017. Di Kota Yogyakarta sebanyak 103.000 anak usia 9 bulan sampai kurang dari 16 tahun akan menjadi sasaran imunisasi MR.

Sampai kini dia menyebut belum ada laporan terkait sekolah yang menolak imunisasi itu. Ditegaskan, tujuan pemberian vaksin itu untuk mengeliminir penyakit campak dan rubella yang berisiko tinggi dampaknya bagi kesehatan. Apalagi jika vaksin itu ditanggung sendiri biayanya cukup tinggi yakni Rp 400 ribu.

"Yang menolak harus ada pernyataan jika ada risiko pada anak yang tidak diimunisasi MR, nantinya harus ditanggung sendiri. Kalau ada satu anak yang tidak diimunisasi itu bisa berpotensi menularkan ke anak yang lain," terangnya.

Secara terpisah, Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kota Yogyakarta Sigit Warsito menyatakan, pihaknya belum menerima laporan soal adanya sekolah di bawah Kemenag yang menolak imunisasi itu. Namun Kemenag Kota Yogyakarta memastikan mendukung imunisasi MR sepanjang vaksin diberikan halal dan sesuai ajaran Islam.

Di Bantul, Dinas Kesehatan Bantul juga mulai mencium adanya penolakan terhadap imunisasi anticampak tersebut. Bahkan penolakan selalu ditemui selama bertahun-tahun pada setiap program imunisasi.

Kepala Dinkes Bantul, Maya Sintowati menambahkan, untuk meredam penolakan itu pihaknya menggunakan upaya persuasif.

Selain mengerahkan petugas Dinkes, Puskesmas yang mengampu wilayah juga dioptimalkan dengan menggendeng pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa. Dari tahun ke tahun Maya menjelaskan sudah ada perkembangan baik terkait penolakan tersebut. Kelompok yang awalnya menolak sebagian sudah menerima. (Tri/C-1)-a

Instansi	Nilai Berita	
1. Din. Kesehatan	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/>
2. Kan. Kemenag	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/>
3.	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input type="checkbox"/> Biasa
4.		<input type="checkbox"/> Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kan. Depag/Kan. Kemenag			

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005